



TRANSNASIONAL ISLAM DAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Iman Saifullah

Dosen FPIK Universitas Garut
saifullahazka@yahoo.co.id

Abstrak

Pesantren dan madrasah di Indonesia memiliki afiliasi yang sama dengan pengajaran teks-teks agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Inti kurikulum agama yang ada di pesantren-pesantren di Indonesia terdiri dari Fiqih Syafi'i dan sering dilengkapi dengan etika Sufi. Dinamika yang berkembang di dunia pesantren terlebih para reformis mendirikan pesantren yang menawarkan kurikulum yang berhubungan dengan orientasi reformis dan sebagai bagian dari gerakan Islam internasional. RUU Sisdiknas telah mengakui secara hukum lembaga pondok pesantren ini sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ini harus dimaknai sebagai good will dari pemerintah dalam memperhatikan aspek pendidikan masyarakat sampai ke tingkat paling kecil. Tradisionalisme Islam yang telah menjadi identitas pesantren secara umum dapat dikembangkan dan merupakan gerakan untuk mengajak kembali ke akar tradisi. Begitupun modernisme seharusnya menjadi gerakan pembaharuan sistem pendidikan Islam dengan tetap membangun kebersamaan, toleransi dengan dasar nilai-nilai 'rahmatan lil 'alamin'.

Kata kunci: Transnasional Islam, Pesantren, Gerakan Islam

Pendahuluan

Perkembangan dan Metamorfosis yang terjadi pada dunia pesantren di Indonesia merupakan keniscayaan. Bagaimana tidak, pesantren kini memasuki medan pertarungan yang dapat dikatakan pada level yang tegang. Isu yang merebak terkait radikalisme dan terorisme bahkan menjadi isu internasional merupakan sebuah ujian bagi dunia pesantren di Indonesia. Hal ini dikaitkan dengan peristiwa hancurnya gedung WTC 9/11 sampai pada peristiwa bom bali 12 oktober 2002 yang disinyalir dilakukan oleh para alumni pesantren yang dikenal dengan Amrozi cs. Para pelaku bom bali tersebut diduga terkoneksi dengan pesantren salah satunya pesantren Al-Mukmin Ngruki pimpinan Abu Bakar Ba'asyir.

Martin Van Bruinessen melihat bahwa pesantren Al-Mukmin Ngruki merupakan salah satu alternatif lembaga pendidikan Islam yang dibentuk sebagai sebuah kritik terhadap keberadaan pesantren secara umum dan tampil sebagai reformis pesantren terlebih menjadi pembeda dari tradisi pesantren di pulau Jawa bahkan mungkin di Asia Tenggara yang dominan dengan budaya konservatif¹, dianggap statis dan mengedepankan budaya 'nurut' dengan apa

¹ Martin Van Bruinessen dengan judul "Traditionalist' and 'Islamist' pesantrens in Indonesia" dimana makalah ini telah dipresentasikan pada sebuah workshop dengan tema 'The Madrasa in Asia,

yang disampaikan oleh guru (kyai). Berbicara Pesantren tidak terlepas dari berbicara gerakan reformis di Indonesia dengan melihat sedikit ke belakang pada masa awal abad 19 seperti Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah yang selanjutnya muncul gerakan Salafi Saudi dan gerakan Islam lainnya. Gerakan reformis Islam yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari pandangan terhadap sekolah modern yang mana diasosiasikan mengalami berbagai macam pergulatan antara modern yang diwakili oleh Muhammadiyah dan tradisional oleh Nahdhatul Ulama (NU). Selain sistem sekolah Islam di Indonesia merupakan sistem pendidikan Islam paling maju di dunia, namun mempunyai kecenderungan melahirkan para militan².

Muhammadiyah, yang didirikan pada tahun 1912, fokus sebagian besar energinya pada pendidikan dan kesejahteraan, rumah sakit dan sekolah didirikan dengan gambaran yang lebih modern sampai pada menentang praktek 'sinkretis' yang tidak ada presedennya dapat ditemukan dalam ajaran Qur'an dan Hadits. Perkembangan pendidikan dalam tubuh Muhammadiyah dapat dilihat mulai dari sekolah tingkat dasar sampai kepada perguruan tinggi yang tersebar begitu luas di Indonesia. Muhammadiyah tampil sebagai sebuah organisasi masyarakat yang besar dan mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan pendidikan modern di Indonesia. Lain halnya Organisasi Masyarakat yang bernama Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tahun 1926 tepatnya untuk melindungi lembaga-lembaga dan praktek-praktek yang dikritik oleh kaum reformis. NU adalah organisasi masyarakat (dalam hal ini berbasis pesantren di awal pendiriannya) berbasis ulama dengan kekuatan massa yang mendominasi kekuatan ormas ini. Sejarah telah memberikan bukti bahwa ormas NU merupakan salah satu kekuatan di Indonesia dengan dinamika sejarah dimana ormas ini menjadi partai politik setelah kemerdekaan. Ormas ini memiliki basis pendidikan pesantren yang begitu kental, bagaimana tidak bahwa ulama yang menjadi tujuan awal didirikannya ormas ini berangkat dari tradisi pesantren dengan motor penggerak para santri.

Keberadaan pesantren tidak dapat dihapus dari sejarah Indonesia yang telah membuktikan perannya mulai dari perlawanan penjajahan Belanda sampai kepada Penjajahan Jepang kaum santri tampil sebagai garda terdepan dalam melakukan perlawanan terhadap tekanan bahkan penyerangan kepada rakyat di beberapa wilayah Indonesia. Santri yang mungkin dianggap kaum 'sarungan' itu tampil sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia dan menjadi motor penggerak bagi perjuangan bangsa bersama rakyat. Keberadaan santri yang dekat dengan rakyat serta keberadaan pesantren tempat nyantri menjadi basis dan sebagai lembaga pendidikan Indonesia yang menggambarkan ciri khas asli keindonesiaan (*indegenious*) dan berangkat dari, oleh dan untuk rakyat.

Pesantren Tradisional

Terlepas dari perbedaan mengenai waktu kedatangan Islam di Indonesia, sebagaimana tradisi yang berkembang. Daerah-daerah pesisir Jawa atau saat ini dikenal dengan wilayah *pantura* (pantai utara), pada permulaan abad ke-15 M, merupakan kota-kota pelabuhan yang ramai dan padat. Lalu lintas perdagangan melewati lautan masuk dari dan keluar sebagai penghubung antara Jawa dengan dunia mancanegara. Dari interaksi penduduk asli dengan para

transnational linkages and alleged or real political activities' pada ISIM Leiden Belanda yang diselenggarakan pada 24-25 Mei 2004.

² Robert W. Hefner, 2009, "Making Modern Muslim: The Politics of Islamic Education In Southeast Asia". Buku yang berawal dari esai yang dikumpulkan sehingga menjadi buku yang diterbitkan oleh University of Hawaii press pada tahun 2009, merupakan penelitian yang dilakukan dari tahun 2004 hingga 2007. Berisi tentang politik dan budaya pendidikan Islam di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Kamboja.

pedagang, orang-orang Jawa mulai berkenalan dengan agama Islam. Ketertarikan orang-orang Jawa dengan Islam, dikarenakan Islam memberikan rasa berharga kepada masyarakat kecil sebagai sebuah komunitas yang dalam Hinduisme, dipandang lebih rendah dari kasta yang lebih tinggi.

Salah satu upaya penyebaran agama Islam kepada masyarakat Jawa adalah melalui saluran pendidikan. Lembaga pendidikan Islam yang didirikan pada masa awal penyebaran Islam merupakan *prototipe* dari sistem pendidikan pesantren. Pendidikan Islam, pada waktu itu difokuskan pada ajaran-ajaran Islam baik yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadist, maupun yang dikupas dalam kitab-kitab klasik (kitab kuning).

Banyaknya penduduk pribumi yang diislamkan dan keberadaan ulama besar semacam Maulana Malik Ibrahim, dapat menjadi petunjuk adanya pengajaran atau pendidikan karena bagi orang-orang yang telah masuk Islam dibutuhkan pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam. Seiring dengan laju perkembangan masyarakat, maka pendidikan pesantren baik tempat, bentuk hingga substansinya telah jauh mengalami perubahan. Pesantren tidak lagi sesederhana seperti apa yang digambarkan seseorang, akan tetapi pesantren dapat mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman.

Dalam perspektif sejarah, lembaga pendidikan yang terutama berbasis di pedesaan ini telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang, sejak sekitar abad ke 18. seiring dengan perjalanan waktu, pesantren sedikit demi sedikit maju, tumbuh dan berkembang sejalan dengan proses pembangunan serta dinamika masyarakatnya. Ini menunjukkan bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan pesantren untuk mendinamisir dirinya sejalan dengan tuntutan dan perubahan masyarakatnya.

Dinamika lembaga pendidikan Islam yang relatif tua di Indonesia ini tampak dalam beberapa hal, seperti :

1. Peningkatan secara kuantitas terhadap jumlah pesantren.
2. Kemampuan pesantren untuk selalu hidup ditengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami berbagai perubahan. Pesantren mampu memobilisasi sumber daya baik tenaga maupun dana, serta mampu berperan sebagai benteng terhadap berbagai budaya yang berdampak negatif.

Sedangkan perkembangan secara kuantitatif maupun kemampuan bertahan ditengah perubahan, tidak otomatis menunjukkan kemampuan pesantren untuk bersaing dalam memperebutkan peserta didik. Seperti apa yang digambarkan Dhofier³ bahwa dominasi pesantren di dunia pendidikan mulai menurun secara drastis setelah tahun 1950-an. Salah satu faktornya, adalah lapangan pekerjaan "modern" mulai terbuka bagi warga Indonesia yang mendapat latihan di sekolah-sekolah umum. Akan tetapi setelah proklamasi kemerdekaan pemerintah lebih memberikan perhatian terhadap sistem pendidikan nasional, dengan membangun sekolah-sekolah umum dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan, bahwa beberapa pesantren ada yang tetap berjalan meneruskan segala tradisi yang diwarisinya secara turun temurun, tanpa perubahan dan improvisasi yang berarti kecuali sekedar bertahan. Namun ada juga pesantren yang mencoba

³ Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, LP3ES, Jakarta

mencari jalan sendiri, dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik dalam waktu yang singkat. Pesantren semacam ini adalah pesantren yang menyusun kurikulumnya, berdasarkan pemikiran akan kebutuhan santri dan masyarakat sekitarnya.

Maka dari pada itu, apapun motifnya perbincangan seputar dinamika pesantren memang harus diakui mempunyai dampak yang besar dan mampu bertahan sampai saat ini.

Dapat kita tarik sebelum abad sebelumnya, pada abad kesembilan belas-awal tidak ditemukan lembaga pendidikan di Indonesia bahkan hampir tidak ada lembaga yang dikenali kecuali lembaga pendidikan agama yang bernama pesantren. Pendidikan agama tingkat dasar berlangsung secara informal di masjid atau di rumah pribadi seorang pria yang sedikit lebih paham akan keilmuan dan mampu berperan dan belajar dari lingkungannya. Pada akhir abad ke delapan belas ini muncul sekolah di wilayah Ponorogo, yang mungkin juga telah bernama pesantren di Tegalsari yang kemudian berhubungan erat dengan cikal bakal kemunculan pesantren Gontor. Pesantren yang ada saat itu didirikan oleh orang-orang yang telah menghabiskan beberapa tahun belajar di Mekkah atau di Kairo setelah melakukan ibadah haji mereka. Pesantren tampaknya dimodelkan pada lembaga Kairo Al-Azhar, lingkaran studi (*halqa*) di Masjid Agung Mekah (Masjid al-Haram), Madrasah Sawlatiyya, yang didirikan oleh Muslim India pada tahun 1874, pada tahun 1934 Dar al-'Ulum al-Diniyya, yang ada sampai hari ini dan telah menjadi pusat utama dari orientasi bagi pesantren Indonesia.

Metode pengajaran di pesantren Indonesia yang diikuti orang-orang Mekah dan Kairo, dan reformasi pendidikan di pusat-pusat ini (ruang kelas, kelas dinilai, pergeseran kurikulum) secara bertahap menyebar dari sana ke pesantren di Indonesia. Kurikulum di Indonesia sangat mirip dengan yang ada di daerah lain di mana sekolah Syafi'i diikuti. Beberapa kompendium doktrin Asy'ari dan buku pegangan utama Syafi'i sebagai dominasi rujukan fiqh dijadikan kurikulum pengajaran. Panggilan reformis untuk kembali ke al-Qur'an dan hadis (untuk menggantikan kritis berikut teks fiqh klasik) ditolak mentah-mentah oleh dunia pesantren, tapi itu memiliki efek yang kolektif bagi hadits dengan hadits-hadits Bukhari dan Muslim dan peningkatan berbagai komentar Al-Qur'an menjadi dimasukkan dalam kurikulum banyak pesantren dalam perjalanan abad kedua puluh.

Siswa mempelajari teks tertentu dengan guru tertentu. jika pernah menawarkan interpretasi kritis atau bahkan komentar pada penerapan apa yang dibaca menjadi preseden kurang baik. Ajaran yang diturunkan itu harus diperlakukan dengan hormat, menghalangi diskusi kritis. Dalam hal ini Reformis mengkritik taqlid, yang 'buta' berikut putusan ulama masa lalu, dan menyatakan perlunya penafsiran independen, ijtihad terhadap pemikiran-pemikiran fiqhiah. Untuk kalangan tradisionalis fiqh memiliki peran penting bahkan mungkin menjadi pegangan dan milik inti dan penting dari Islam,

Perdebatan antara reformis dan tradisionalis, yang kadang-kadang sangat panas berkisar isu-isu seperti taqlid, ritual untuk mati dan hal-hal yang bersifat budaya. Reformis juga mengkritik pendidikan pesantren untuk penekanan pada hafalan tanpa pemahaman kritis dan studi teks skolastik pasca-klasik daripada sumber-sumber asli dari Qur'an dan hadits.

Kemudian berkembang kebutuhan pendidikan sebagai tuntutan pasar tenaga kerja yang semakin masif dan banyak merubah orientasi pendidikan bukan hanya sebagai bekal ilmu pengetahuan tetapi juga menjadi tumpuan untuk bersaing dalam pekerjaan mencari uang. Perubahan pemikiran dalam pendidikan tersebut menuntut lembaga pendidikan untuk beradaptasi dan bekerja keras menambahkan mata pelajaran umum pada lembaga-lembaga agama.

Di Indonesia, madrasah yang merupakan upaya adaptif pemerintah selalu mengupayakan pengawasan dan melakukan upaya penekanan dengan mata pelajaran agama 30 persen dan 70 persen pelajaran umum, menawarkan ijazah yang memberikan pembukaan pekerjaan sebagai guru agama. Banyak pesantren telah mengadopsi sistem madrasah dan memiliki perdebatan panjang atas keberadaannya terlebih pada masa kemerdekaan sehingga sampai batas tertentu menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional di bawah Departemen Agama.

Pesantren yang dikelola kurikulum 'tradisional' dan metode pengajaran yang kemudian dikenal sebagai 'Salafiyah', istilah yang saat ini sering tertukar dengan "Salaf" sebagai sebuah pergerakan fundamentalis Islam. Dalam hal keyakinan agama dan praktek mereka mewakili ekstrem pemahaman terhadap kritik tradisionalis. Muhammadiyah menjadi terkenal karena sekolah-sekolah modern, yang menawarkan kurikulum umum yang baik. Muhammadiyah mendirikan beberapa madrasah untuk melatih guru-guru agama sendiri.

Untuk menjembatani kesenjangan antara sikap keagamaan Muhammadiyah dan pendidikan pesantren tradisional. Gontor tampil sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam 'modern' dengan kurikulum gabungan dari studi teks-teks klasik dengan konsep pendidikan modern dan semangat reformis; menjadi contoh yang kemudian mengadopsi berbagai sekolah yang bisa dikatakan mengambil tren reformis modernis di India dengan konsep Aligarh dimana mengambil nilai-nilai filosofi Rabindranath Tagore sebagai konsep modernitas. Kemudian mengambil nilai filosofis pendidikan dan percobaan dengan Santiniketan nya. Selain cara pandang terhadap nilai-nilai yang ada, santri diwajibkan untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab atau Inggris. Dapat dikatakan bahwa pesantren Gontor mengambil tempatnya di antara NU dan Muhammadiyah.

Kemudian muncul Al Irsyad yang merupakan gerakan reformasi sosial dan keagamaan yang aktif di masyarakat Hadrami di Indonesia, terlihat lebih konservatif. Al Irsyad di Jakarta didirikan pada tahun 1913 mengajarkan kurikulum mata pelajaran agama dan umum secara eksklusif dalam bahasa Arab, dimana guru-guru yang ada dari Arab Timur Tengah. Lulusan madrasah ini menyebarkan pesan reformis sebagai guru dan pengkhotbah.

Persatuan Islam (Persis), didirikan di Bandung pada tahun 1923, sebagai sebuah gerakan puritan, gerakan reformasi di Indonesia mendekati Saudi Salafisme, pendirinya A. Hassan, mencerminkan semangat rasional, penekanan kuat pada Qur'an dan hadits. satu-satunya pesantren yang sengaja non-mazhab dan fokus sangat kuat pada studi hadis.

Perpecahan terjadi antara pendukung Muslim dari gerakan kemerdekaan ketika kepemimpinan nasionalis melakukan negosiasi dengan Belanda, gerilya Muslim yang menolak untuk mengambil upaya negosiasi mendirikan pemerintahan dengan nama Darul Islam. Setelah kemerdekaan, Darul Islam menolak mengakui pemerintahan republik sekuler di Jakarta, mengontrol berbagai hal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kaum nasionalis di pusat Jakarta terhadap bagian pegunungan Jawa Barat dan berhasil menolak semua upaya untuk menundukkannya. Gerakan di Aceh dan Sulawesi Selatan bergabung menyebut dirinya Negara Islam Indonesia (NII), dimana mereka memiliki pengadilan syari'ah sendiri sebagai lembaga utama non-militer. Pada awal tahun enam puluhan, gerakan itu akhirnya kalah Darul Islam terus berlanjut sebagai gerakan bawah tanah, merekrut anggota baru dan menjadi gerakan yang kurang muncul saat ini.

Pada masa kemerdekaan para penggerak muslim menciptakan organisasi payung Muslim yang bernama Masyumi sebagai partai politik besar dimana Organisasi Masyarakat NU berada didalamnya. Pada tahun 1952, NU memisahkan diri dari Masyumi menjadi partai politik yang terpisah. Pecahnya NU dari Masyumi merupakan sejarah bangsa Indonesia dan menjadi pergulatan politik yang selalu menghangat dan berlanjut pada perkembangan politik Indonesia sampai saat ini.

Spektrum keagamaan antara kelompok-kelompok dan individu yang menonjol bahkan jika dipandang secara kritis membenci kebijakan pemerintah dalam hal rekayasa sosial dan agama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Partai Masyumi misalnya, sebagai gerakan muslim reformis Masyumi mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah dalam orientasi religius, liberal demokrasi dan dalam gaya politiknya, Suharto tidak pernah mengizinkan partai yang berbasis Masyumi masuk kedalam politik Indonesia dengan membentuk tiga partai saja.

Melihat konstalasi politik yang didominasi oleh rezim orde baru mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang dimotori Natsir dan teman-temannya dengan tujuan untuk mengubah masyarakat dan negara melalui perubahan individu yang mengubahnya menjadi Muslim yang lebih baik.

Di sisi lainnya Jaringan bawah tanah aktivis Islam yang berusaha untuk mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Jaringan terdiri dari sisa-sisa gerakan Darul Islam, sebagai 'Negara Islam dan Tentara Indonesia' (NII / TII) menantang Republik pemerintah. hubungan erat antara Masyumi dan Darul Islam mengalami perdebatan yang cukup sengit terlebih dalam kepemimpinan keduanya selalu bertentangan satu sama lain.

Darul Islam adalah gerakan rumah-tumbuh dan tidak pernah memiliki kontak internasional yang layak. Masyumi telah lebih berorientasi internasional, dan DDII yang mengembangkan kontak sangat dekat dengan Semenanjung Arab. Ini menjadi mitra Indonesia disukai oleh Liga Muslim Saudi yang disponsori Dunia (Rabitat al-`Alamal-Islamiyyah), DDII adalah perantara melalui ide-ide dari Ikhwanul Muslimin Mesir. Martin⁴ melihat bahwa Pesantren Gontor adalah salah satu yang ideologisnya paling dekat dengan DDII.

Lain halnya dengan pesantren Al-Mukmin yang mana mempunyai benang merah yang sangat kuat dengan sosok Abdullah Sungkar⁵ dimana ia berhubungan erat dengan lulusan Gontor bernama Abu Bakar Ba'asyir. Pesantren Al-Mukmin bertujuan untuk menggabungkan aspek terbaik dari dua model, Gontor untuk pengajaran bahasa Arab, dan pesantren Persis di Bangil untuk pengajaran syari`ah.

⁴ Martin Van Bruinessen, 2004, 'Traditionalist' and 'Islamist' pesantrens in Indonesia, Leiden Belanda

⁵ Sungkar maupun Ba'asyir dan rekan-rekan, mereka dengan keras menentang rezim Suharto. Sungkar berafiliasi melalui Badan Komunikasi Remaja Masjid (BKRM). Sungkar dan Ba'asyir bergabung dengan Darul Islam mendirikan struktur bawah tanah sebagai organisasi disebut sebagai Jama`ah Islamiyah. Sungkar dan Ba'asyir secara terbuka menentang ideologi negara Pancasila dan menyerukan boikot pemilu 1977 ia dan Ba'asyir melarikan diri ke Malaysia untuk menghindari penangkapan. Mereka mengambil bagian dalam jihad Afghanistan dan mendapatkan pengalaman gerilya. Pada awal 1990-an, Sungkar dan Ba'asyir pecah walaupun keberadaan keduanya sama dan dalam kepemimpinan Darul Islam, berusaha untuk pembentukan negara Islam di Asia Tenggara (Martin Van Bruinessen, 2004, 'Traditionalist' and 'Islamist' pesantrens in Indonesia, Leiden Belanda)

Sungkar meninggal pada awal 1999, dan Ba'asyir menggantikannya. Ia kembali ke Ngruki dan mulai mengajar di pesantren lagi. Pada bulan Agustus 2000, faksi dari bawah tanah sebelumnya DI membentuk Majelis Mujahidin dimana Ba'asyir terpilih sebagai amir. Faksi DI lainnya menolak bergabung dan tetap di bawah tanah. Sungkar dan Ba'asyir keduanya menjadi sumber kebanggaan untuk pesantren di Ngruki. Reputasi radikal untuk hubungan sekolah dengan pemerintah menjadi sinyalemen kuat terhadap ide-ide penentangan terhadap ideologi Pancasila dan sistem demokrasi di Indonesia.

Pesantren Hidayatullah Balikpapan di Kalimantan Timur menarik dan sangat sukses. Pada tahun 1973 pesantren ini dibentuk oleh Abdullah Said mantan aktivis DI sebagai Islam reformis dengan penekanan kuat pada Al-Qur'an dan hadits. Tidak hanya sebagai lembaga pendidikan Islam tetapi pesantren Hidayatullah mengorganisir dalam berbagai kesejahteraan sosial dan kegiatan ekonomi di antara orang-orang yang tinggal di sekitar pesantren tersebut. Pesantren Hidayatullah tersebar di berbagai belahan Nusantara. Baru-baru ini jaringan Hidayatullah telah mengubah dirinya menjadi sebuah asosiasi nasional formal dengan cabang di hampir 200 kabupaten di seluruh negeri⁶.

Tidak lengkap rasanya tanpa menyebutkan dunia pesantren di Indonesia tanpa menyebutkan Pesantren Al-Zaytun Indramayu sebagai pesantren yang kontroversi. Keberadaannya yang mengejutkan sekaligus mengherankan karena sumber daya yang tampaknya tak terbatas dan memiliki akses kuat. Keberadaannya diduga dengan jaringan DI bawah tanah serta organisasi intelijen negara. Pendiriannya menjadi sosok megalomaniak yang tidak terlepas dari sosok pendirinya bernama AS (Abdussalam) Panji Gumilang, terlihat jauh lebih makmur dan modern daripada kebanyakan pesantren bahkan kampus universitas. Pesantren Al-Zaytun memiliki cukup banyak lahan, meningkatkan ternak dan unggas dan mengatur berbagai kegiatan ekonomi lainnya menyebabkan banyak spekulasi mengenai asal-usul kekayaan, dan gerakan Darul Islam. Di duga keberadaan pimpinan Al-Zaytun tidak lepas dari Darul Islam, yang menjadi "Komando Daerah IX '(KW9)". Hal itu diklaim, bagaimana tidak berbagai macam klaim dimana diajarkan interpretasi kuno Al-Qur'an diluar komunitas mereka sendiri dinyatakan sebagai kafir. Masyarakat dibandingkan oleh dirinya sebagai pengikut Nabi di Mekah. Sehingga membawa pada pemahaman bahwa Kewajiban *qonuni* dan larangan-larangan dari syari'ah itu belum diimplementasikan di Mekkah sampai negara Islam akan dibentuk. Disamping itu anggotanya untuk memberikan kontribusi jumlah rutin ke kas gerakan.

Berbeda dengan jaringan Hidayatullah, Al-Zaytun tidak menunjukkan minat pada penyebab jihad internasional; fokusnya adalah pada Indonesia, dan wacana publik yang developmentalis mengingatkan kepada Orde Baru Soeharto.

Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Banyak pesantren mengajarkan kurikulum sekolah agama yang dikelola pemerintah yang dikenal dengan madrasah dimana pemerintah memberikan ijazah yang sama antara madrasah dan sekolah umum di bawah pemerintah. Madrasah Ibtida'iyah sebagai pendidikan Dasar, Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah sebagai jenjang pendidikan menengah. Beberapa

⁶ Jaringan ini sangat erat kaitannya dengan diaspora Bugis. Jaringan Hidayatullah terkenal luas melalui majalah yang telah diterbitkan sejak tahun 1988, Suara Hidayatullah memiliki misi yang kuat. Melakukan upaya untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah, bahkan banyak menerima penghargaan dari pemerintah seperti Kalpataru dalam pelestarian lingkungan, menerima banyak kunjungan asing bahkan ditunjuk oleh Departemen agama dalam mendistribusikan Zakat (Martin Van Bruinessen, 2004, 'Traditionalist' and 'Islamist' pesantrens in Indonesia, Leiden Belanda).

pesantren menawarkan tingkat yang lebih tinggi yang dapat disebut dengan jenjang Muallimin, yaitu 'pelatihan guru', atau Ma' 'had' Ali sebagai jenjang pendidikan tinggi.

Dari tahun 1960-an jumlah lembaga tersebut semakin berkembang, kemudian dengan perkembangannya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan dengan munculnya Institut Agama Islam (IAIN) yang meningkat pesat. Hal ini memberikan angin segar bagi kebanyakan pesantren untuk dapat diterima dan keberadaannya diakui dalam sistem pendidikan nasional dan menjadi terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.

Beberapa pesantren sengaja menolak mengadopsi Kurikulum madrasah Pada 1970-an dan 1980-an. Pesantren cenderung menutup diri dengan istilah-istilah umum atau kebarat-baratan. Tetapi dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan yang semakin kompetitif beberapa pesantren bereksperimen dengan mengajarkan keterampilan pertanian atau teknis selain mata pelajaran agama. Pesantren Pabelan Yogyakarta ataupun Gontor contohnya, menjadi terkenal karena pelatihan siswa dalam keterampilan yang dapat berguna ketika mereka kembali ke desa mereka. Dengan berjalannya waktu kerjasama yang dikembangkan sejumlah pesantren dengan pemerintah begitu nampak melalui komitmen sosial yang pasti dan menjadi sebuah keyakinan dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan dari bawah. Percobaan dari Paulo Freire dengan di Brasil terhadap masyarakat miskin melalui 'penyadaran', dan dari kritik radikal pendidikan yang didirikan oleh para pemikir seperti Ivan Illich memberikan alternatif-alternatif yang lebih konkrit dalam pembangunan masyarakat.

Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan kebijakan depolitisasi bagi penduduk pedesaan dimana Pesantren yang berbasis pedesaan sekalipun sebagai hanya lembaga non-pemerintah benar-benar berfungsi pada tingkat akar rumput, dan mengambil peran sebagai *bottom-up development* selain sebagai pengganti kebijakan *top-down* pemerintah. Pesantren sebagai simpul untuk pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat miskin seharusnya mengambil peran strategis dalam pembangunan pedesaan. Lain halnya Institut Teknologi Bandung dicegah dari keterlibatan politik pada tahun 1978, hal ini menjadi inisiatif untuk membawa teknologi yang tepat untuk masyarakat miskin pedesaan didorong berinteraksi melalui pesantren. Lembaga barat memberikan bantuan salah satunya Partai Liberal Jerman Friedrich Naumann Foundation, mendukung upaya ini secara finansial dan dengan tenaga ahli. Dalam dua dekade dapat terlihat peningkatan dramatis dalam aktivitasnya, dimana peran pesantren sekalipun banyak opini tetapi secara objektif mampu memberikan keberhasilan ekonomi melalui program yang lebih terbagi. Integrasi pesantren kedalam sistem pendidikan nasional dijuluki dengan 'tradisionalis progresif', dan menjadi salah satu fenomena yang paling mengejutkan dan menarik di akhir 1980-an dan 1990-an.

Kedudukan Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional

Secara konstitusional ditetapkan bahwa negara Indonesia berdasarkan pada agama. Artinya bahwa Negara Indonesia melindungi dan menghargai kehidupan beragama dari seluruh warga Negara Indonesia. Berdasarkan tinjauan sosial kultural, memang terlihat bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragama yang percaya kepada Tuhan. Kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai agama sehingga kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan agama, pendidikan agama tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Umat beragama beserta lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia merupakan potensi besar dan sebagai modal dasar dalam pembangunan mental spiritual bangsa dan merupakan potensi nasional untuk pembangunan fisik materiil bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan

pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Adapun tujuan pendidikan nasional dirumuskan dalam GBHN sebagai berikut; *“Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa”*.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam point (c) dijelaskan bahwa: “Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.”

Sedangkan untuk kemudahan layanan pendidikan, UU Sisdiknas juga merincikannya yang termaktub dalam Pasal 11 Ayat (1): “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Dan atas dasar inilah, Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin berlangsungnya pelaksanaan pendidikan, dengan tidak membedakan apakah pendidikan tersebut dikategorikan “umum” atau berbasiskan “agama”. Hal ini diperjelas lagi dalam Ayat (2) pada UU Sisdiknas tersebut, yaitu bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Muncul kekhawatiran dari sebagian pihak apabila pendidikan agama diserahkan kepada daerah maka ciri khas madrasah tidak dapat dipertahankan sehingga madrasah tidak ada bedanya dengan sekolah umum⁷

UU Sisdiknas Nomor 20/2003 sangat jelas menyebutkan bahwa tidak adanya perbedaan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Bahkan jauh hari sebelum lahirnya UU Sisdiknas ini, pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama yang kala itu dijabat oleh KH. Ahmad Wahid Hasyim telah melakukan pembaruan pendidikan agama Islam melalui peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1950, yang menginstruksikan pemberian pelajaran umum di madrasah dan memberi pelajaran agama di sekolah umum negeri/swasta. Maka mengingat hal ini pulalah, menyebabkan pondok pesantren dewasa ini lebih membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum. Pesantren tidak hanya mengadopsi madrasah tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah umum. Pesantren Tebuireng Jombang adalah pesantren pertama yang mendirikan SMP/SMA.

Langkah ini kemudian diikuti oleh pesantren-pesantren lain, bahkan saat ini pesantren-pesantren berlomba-lomba mendirikan sekolah-sekolah umum untuk mengikuti tuntutan masyarakat agar santri bisa belajar pengetahuan agama dan menguasai pengetahuan umum seperti murid-murid di sekolah-sekolah umum sehingga akses santri dalam melanjutkan pendidikan semakin meluas seperti sekolah-sekolah umum di luar pesantren. Saat ini tidak

⁷ Husni Rahim, 2005, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, hal 103

jarang kita temui pesantren memiliki lembaga pendidikan umum mulai TK, SD, SMP, SMA di samping MI/MIN, MTs/MTsN, dan MA/MAN.

Dengan demikian dapat disimpulkan, pesantren telah memberikan tanggapan positif terhadap pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Dengan didirikannya sekolah-sekolah umum maupun madrasah-madrasah di lingkungan pesantren membuat pesantren kaya diverifikasi lembaga pendidikan dan peningkatan institusional pondok pesantren dalam kerangka pendidikan nasional.

Watak Pesantren dalam lingkaran Fundamental dan Tradisional

Dapat dilihat sejauh ini munculnya gerakan fundamentalis Islam tidak lebih dari dikotomi antara tradisionalisme dengan modernisme, keberadaannya justru mengakibatkan gagasan radikal dan terlalu mengarah kepada misi politis yang menjadi bagian kuat di republik ini. keberadaan Pesantren sebaiknya menjadi solusi konstruktif sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam dalam membangun normatik-religius (nilai-nilai ke-Agamaan) disamping tetap membuka diri pada aspek-aspek ilmu pengetahuan, science dan teknologi serta beradaptasi dengan perkembangan.

Pada momen sejarah ini pulalah saat yang tepat untuk membedakan gerakan-gerakan yang disebut sebagai 'Fundamentalisme Islam' dari Islam Tradisional yang sering dikelirukan siapapun yang telah membaca karya-karya yang bercorak tradisional tentang Islam dan membandingkannya dengan perjuangan aliran-aliran 'fundamentalis' tersebut segera dapat melihat perbedaan-perbedaan mendasar diantara mereka, tidak saja didalam kandungan tetapi juga didalam 'iklim' yang mereka nafaskan. Malahan yang dijuluki sebagai fundamentalisme mencakup satu spektrum yang luas, yang bagian-bagiannya dekat sekali dengan Interpretasi tradisional tentang Islam. Tetapi tekanan utama macam gerakan polito-religius yang sekarang ini disebut fundamentalisme itu mempunyai perbedaan yang mendasar dengan Islam Tradisional. Dengan demikian perbedaan yang tajam antara keduanya terjustifikasi, sekalipun terdapat wilayah-wilayah tertentu, dimana beberapa jenis fundamentalisme dan dimensi-dimensi khusus Islam Tradisional bersesuaian.

Kondisi yang demikian itu nampaknya menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa pesantren sampai sekarang masih eksis dan justru semakin menunjukkan jati dirinya yang kokoh dan tangguh. Memang beberapa perubahan dan modernisasi⁸ telah dilakukan namun itu adalah sebuah kewajaran sebagai tuntutan dari perkembangan dan kemajuan zaman. Sejauh perubahan tersebut tidak menyangkut pada nilai dasar dan filosofi dari lembaga yang bersangkutan.

Persoalan ini tentunya harus dikembalikan pada proporsinya yang pas. Sebab, watak tradisional yang *inherent* di tubuh pesantren seringkali masih disalahpahami, dan ditempatkan bukan pada proporsinya yang tepat. Tradisionalisme yang melekat dan terbangun lama di kalangan pesantren, sejak awal minimal ditampilkan oleh dua wajah yang berbeda. Oleh karena itu, penyebutan tradisional tentu harus ditujukan pada aspek yang spesifik, tidak asal diratakan pemahamannya. Tradisionalisme pesantren di satu sisi melekat pada asas keagamaan (baca:

⁸ Pembaharuan yang terjadi di pesantren merupakan respons pesantren terhadap modernisasi dan perubahan tersebut menyangkut: *Pertama*, pembaharuan substansi dan isi dari pendidikan; *Kedua*, pembaharuan metodologi; *Ketiga*, pembaharuan institusi; *Keempat*, pembaharuan fungsi. Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 105.

Islam). Bentuk tradisionalisme ini merupakan satu sistem ajaran yang berakar dari perkawinan konspiratif antara teologi skolastisisme Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan ajaran-ajaran tasawuf (misticisme Islam) yang telah lama mewarnai corak ke-Islam-an di Indonesia⁹. Selaras dengan pemahaman ini, terminologi yang akarnya ditemukan dari kata 'adat (bahasa Arab) ini, merupakan praktek keagamaan lokal yang diwariskan umat Islam Indonesia generasi pertama. Di sini Islam berbaur dengan sistem adat dan kebiasaan lokal, sehingga melahirkan watak ke-Islaman yang khas Indonesia¹⁰.

Sementara tradisional dalam pengertian lainnya, bisa dilihat dari sisi metodologi pengajaran (pendidikan) yang diterapkan dunia pesantren (baca: salafiyah). Penyebutan tradisional dalam konteks praktek pengajaran di pesantren, didasarkan pada sistem pengajarannya yang monologis, bukannya dialogis-emansipatoris, yaitu sistem doktrinasi sang Kiyai kepada santrinya dan metodologi pengajarannya masih bersifat klasik, seperti sistem bandongan, pasaran, sorogan dan sejenisnya. Lepas dari persoalan itu, karakter tradisional yang melekat dalam dunia pesantren (sesungguhnya) tidak selamanya buruk. Asumsi ini sebetulnya relevan dengan prinsip ushul fiqh, "*al-Muhafadhah 'ala al-Qodimi as-Shalih wa al-Akhdu bi al-Jadid al-Ashlah*" (memelihara [mempertahankan] tradisi yang baik, dan mengambil sesuatu yang baru (modernitas) yang lebih baik). Artinya, tradisionalisme dalam konteks didaktik-metodik yang telah lama diterapkan di pesantren, tidak perlu ditinggalkan begitu saja, hanya saja perlu disinergikan dengan modernitas. Hal ini dilakukan karena masyarakat secara praktis-pragmatis semakin membutuhkan adanya penguasaan sains dan teknologi. Oleh karena itu, mensinergikan tradisionalisme pesantren dengan modernitas dalam konteks praktek pengajaran, merupakan pilihan sejarah (historical choice) yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab, jika tidak demikian, eksistensi pesantren akan semakin sulit bertahan di tengah era informasi dan pentas globalisasi yang kian kompetitif.

Dalam hal ini, memang diperlukan adanya pembaharuan di pesantren, terutama mengenai metodologi pengajarannya, namun pembaharuan ini tidak harus meninggalkan praktek pengajaran lama (tradisional), karena memang di sinilah karakter khas dan indegenousitas pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Justru yang perlu dilakukan adalah, adanya konfigurasi sistemik dan kultural antara metodologi tradisional dengan metodologi konvensional-modern¹¹

Gerakan Tradisionalisme Islam yang diidekan dan dikembangkan merupakan gerakan untuk mengajak kembali ke 'akar tradisi', yang merupakan Kebenaran dan Sumber Asal segala sesuatu dengan mencoba menghubungkan antara sekuler (Barat) dengan dimensi ke-Ilahiah yang bersumber pada wahyu Agama.

Pesantren dalam lingkaran Modernitas

Di tengah pergulatan masyarakat informasional, pesantren 'dipaksa' memasuki ruang kontestasi dengan institusi pendidikan lainnya, terlebih dengan sangat maraknya pendidikan berlabel luar negeri yang menambah semakin ketatnya persaingan mutu out-put (keluaran) pendidikan. Kompetisi yang kian ketat itu, memosisikan institusi pesantren untuk mempertaruhkan kualitas out-put pendidikannya agar tetap unggul dan menjadi pilihan

⁹ Abdurrahman wahid. 1988, "*Principle of Pesantren Education*", dalam Manfred Oepen and Wolfgang Karcher (eds.), *The Impact of Pesantren*, Jakarta: P3M.

¹⁰ Lihat Bruinessen, Martin Van, 1999, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tareka: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan.

¹¹ Ahmad El Chumaedy, 2002, artikel dengan judul: *Membongkar Tradisionalisme Pendidikan Pesantren; "Sebuah Pilihan Sejarah"*, Jakarta

masyarakat, terutama umat Islam. Ini mengindikasikan, bahwa pesantren perlu banyak melakukan pembenahan internal dan inovasi baru agar tetap mampu meningkatkan mutu pendidikannya.

Persoalan ini tentu saja berkorelasi positif dengan konteks pengajaran di pesantren. Di mana, secara tidak langsung mengharuskan adanya pembaharuan. Sebut saja misalnya mengenai kurikulum, sarana-prasarana, tenaga kependidikan (pegawai administrasi), guru, manajemen (pengelolaan), sistem evaluasi dan aspek-aspek lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Jika aspek-aspek pendidikan seperti ini tidak mendapatkan perhatian yang proporsional untuk segera disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat (*social needs and demand*), tentu akan mengancam *survival* pesantren di masa depan. Masyarakat akan semakin tidak tertarik dan lambat laun akan meninggalkan pendidikan 'ala pesantren, kemudian lebih memilih institusi pendidikan yang lebih menjamin kualitas output-nya. Pada taraf ini, pesantren berhadapan dengan dilema antara tradisi dan modernitas. Ketika pesantren tidak mau beranjak ke modernitas, dan hanya berkuat dan mempertahankan otentisitas tradisi pengajarannya yang khas tradisional, dengan pengajaran yang melulu bermuatan al-Qur'an dan al-Hadis serta kitab-kitab klasiknya¹², tanpa adanya pembaharuan metodologis, maka selama itu pula pesantren harus siap ditinggalkan oleh masyarakat. Pengajaran Islam tradisional dengan muatan-muatan yang telah disebutkan di muka, tentu saja harus lebih dikembangkan agar penguasaan materi keagamaan anak didik bisa lebih maksimal, di samping juga perlu memasukkan materi-materi pengetahuan non-agama dalam proses pengajaran di pesantren.

Dengan begitu, pengembangan pesantren tidak saja dilakukan dengan cara memasukkan pengetahuan non-agama, melainkan agar lebih efektif dan signifikan, praktek pengajaran harus menerapkan metodologi yang lebih variatif. Sebab, ketika didaktik-metodik yang diterapkan masih berkuat pada cara-cara lama yang kurang adaptif dengan kebutuhan, maka selama itu pula pesantren sulit untuk berkompetisi dengan institusi pendidikan lainnya.

Penutup

Pesantren dan madrasah di Indonesia memiliki afiliasi yang sama pengajaran teks-teks agama yang bersumber dari Arab melalui kitab-kitab klasik, dalam banyak kasus yang terkait dengan kurikulum non-agama. Dia sendiri melihat bahwa sebagian besar pesantren berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah atau berbagai pandangan keagamaan lainnya. Inti kurikulum agama yang ada di pesantren-pesantren di Indonesia terdiri dari Fiqih Syafi'i dan sering dilengkapi dengan etika Sufi. Banyak pesantren yang dipimpin oleh guru karismatik, yang memiliki kewenangan yang cukup besar di kalangan penduduk pada umumnya.

Dinamika yang berkembang di dunia pesantren terlebih para reformis mendirikan pesantren mereka sendiri dengan menawarkan kurikulum yang berhubungan dengan orientasi reformis mereka, studi fiqh yang dilengkapi atau digantikan oleh Al-Qur'an dan hadits. Gontor tetap menjadi model untuk sebagian besar pesantren reformis, beberapa di antara pesantren. Tidak sedikit pula pesantren yang masih tampak menganggap diri mereka sebagai bagian dari gerakan Islam internasional. Sejumlah kecil pesantren telah sesuai sendiri dengan ide-ide dari Ikhwanul Muslimin atau gerakan Salafi.

¹² Lihat Karel A Steenbrink, 1986, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES.

RUU Sisdiknas telah mengakui secara hukum lembaga pondok pesantren ini sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ini harus dimaknai sebagai *good will* dari pemerintah dalam memperhatikan aspek pendidikan masyarakat sampai ke tingkat paling kecil.

Keinginan baik pemerintah tersebut juga selayaknya direspons secara positif dan pro-aktif oleh lembaga pondok pesantren, yaitu dalam bentuk komitmen menjadi salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional. Sebagai lembaga pendidikan keislaman, pondok pesantren harus mampu mengembangkan lebih banyak pemikiran-pemikiran keislaman yang berguna bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Peran aktif dari pemerintah dan lembaga terkait dalam mengembangkan sistem pendidikan pesantren diharapkan akan mengangkat citra lembaga ini di kalangan umat Islam. Saat ini pengembangan sistem pondok pesantren di Indonesia masih menjadi kiblat bagi negara-negara Islam yang mempunyai sistem yang serupa

Tradisionalisme Islam yang telah menjadi identitas pesantren secara umum dapat dikembangkan dan merupakan gerakan untuk mengajak kembali ke akar tradisi. Begitupun modernisme seharusnya menjadi gerakan pembaharuan sistem pendidikan Islam dengan tetap membangun kebersamaan, toleransi dengan dasar nilai-nilai '*rahmatan lil 'alamin*'.

Referensi

- Azra, Azyumardi. 1999, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru*, Logos, Jakarta
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, LP3ES, Jakarta
- El Chumaedy, Ahmad. 2002, artikel dengan judul: *Membongkar Tradisionalisme Pendidikan Pesantren; "Sebuah Pilihan Sejarah"*, Jakarta
- Geertz, Clifford. 1989. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, alih bahasa Aswab Mahasin, penyunting Bur Rasuanto, Jaya, cet. III, Penerbit Pustaka, Jakarta
- Hefner, Robert W. 2009, *Making Modern Muslim: The Politics of Islamic Education In Southeast Asia*. University of Hawaii Press
- Kam Hing, Lee. 1995, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965*, University of Malaya Press. Kuala Lumpur Malaysia
- Nasr, Sayyed Hossein, 2003, *Islam Agama, Sejarah dan Peradaban*, Risalah Gusti, Surabaya
- Rahardjo, Dawam M (Editor). 1985, *Pergulatan Dunia Pesantren*, cet.I, Penerbit P3M, Jakarta
- Rahim, Husni. 2005, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- Schleifer, Aliah. 1988, *The Role of Muslim Mother in Education in Contemporary Society*, dalam *Muslim Education Quarterly*, Vol. V, No. 2, The Islamic Academy, United Kingdom
- Steenbrink, Karel A. 1986, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES.
- Syukri Zarkasyi, Abdullah. 2005, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Van Bruinessen, Martin. 2004. "'Traditionalist' and 'Islamist' pesantrens in Indonesia", paper presented at the workshop 'The Madrasa in Asia, transnational linkages and alleged or real political activities', ISIM, Leiden, 24-25 May 2004.
- Wahid, Abdurrahman. 1981, *Muslim di Tengah Pergumulan*, cet. I, Penerbit Leppenas, Jakarta

- _____, 1988, "*Principle of Pesantren Education*", dalam Manfred Oepen and Wolfgang Karcher (eds.), *The Impact of Pesantren*, Jakarta: P3M.
- Ziemek, Manfred. 1986, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, cet. I, Penerbit P3M, Jakarta
- Zuhdi, Muhammad. 2005, *The 1975 Three-Minister Decree and The Modernization of Islamic Education in Indonesia*. *American Educational History Journal* 32, 36-43.